

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Refika Aditama.
- Alhakim, Abdurrahman. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9 (1).
- Charles Zastrow. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. Brooks/Cole Publishing Company.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Dhenissa, Herman dan Yuningsih. (2023). Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 22(2).
- Fauziah, Aghnis. (2021). Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya. Diakses 2 Februari 2024 dari <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>
- Dwiyanti, Tetty dan Musdalipah. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 58-67.
- Edi Suharto. (2009). Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial. Pustaka Pelajar.
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(2), 161-184.
- Grindle, M. S. 1997. *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*.
- FH UI. 2019. Bahaya Dampak Kejahatan Seksual. Diakses 2 Februari 2024 dari <https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>
- Ismawiyah dan Yuliani. (2023). Efektivitas Pelayanan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKKRDU) Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1).

- Diskominfo Kota Bandung. (2023). Tren Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Meningkat. Diakses 4 Februari 2024 dari <https://jabarprov.go.id/berita/tren-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-11508>
- Kriawahyu, H., dkk. (2017). Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei OMBUDSMAN RI. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Jakarta.
- Lestari, dkk. (2021). Efektivitas Kinerja PP2TP2A Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5(1).
- Lisdayanti dkk, 2023. Peran Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Konsep Dekonsentrasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang). *Jurnal Lex Specialis* 4(2).
- Mardiyati, Isyatul. (2021). Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Margareta dan Sari. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati). *Wahana Didaktika Jurnal Ilmu Kependidikan* 18(2).
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noor, Wiwid. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1).
- Nova, Amalia dan Prathama. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1).
- Pasalbessy, J.D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3).
- Putri, dkk. (2022). Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(2).
- Rusyidi dan Santoso. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Sosio Informa* 4(1).

- Salsabila dan Nunung. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Jurnal* 12(2).
- Safitriana dkk. (2020). Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pergaulan di Masyarakat. *Jurnal Lex Suprema* 2(2).
- Santoso dan Achjani. (2003). *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sapa Institute. (2020). Sapa Institute: Kabupaten Bandung Dominasi Kasus KDRT di Jawa Barat. Diakses 4 Februari 2024 dari <https://yayasansapa.id/sapa-institute-kabupaten-bandung-dominasi-kasus-kdrt-di-jawa-barat/>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Susilowati dan Ratnaningrum. (2023). Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta). *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 22(2).
- Syaroh dan Widowati. (2018). Efektivitas Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review* 7(3).
- Taroreh dan Rabiatul. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sekolah Dasar dari Tindakan Kekerasan dan Bullying. *Unes Law Review* 6(2).
- Tuharea, dkk. (2020). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Maluku.
- Wagisri dan Pusnita. (2022). Efektivitas Pelayanan Penanggulangan Kekerasan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang. *Journal of Sciences and Politics* 9(1).
- Wailidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Ground Theory*. FTK Ar-Raniry Press. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(4).
- Yusni dkk. (2022). Efektivitas Layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *Journal Unismuh* 3(3).

Sumber lain:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010.